

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Tahun 2020 akan menjadi sejarah sebagai tahun terjadinya wabah mematikan berskala global yang melumpuhkan berbagai aktivitas perekonomian dunia. Wabah itu dinamakan dengan *Covid-19*, yang merupakan singkatan dari *Coronavirus Disease-19*. WHO (*World Health Organization*) sebagai organisasi kesehatan dunia telah menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Untuk menekan angka penyebaran dari *Covid-19* ini salah satu upaya pemerintah dengan melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dengan tujuan membatasi mobilitas manusia (Green, 2020). Kebijakan pembatasan tersebut tentunya akan berdampak kepada aktivitas diberbagai sektor. Menurut analisis ekonomi Ronald Beger dan Dcode salah satu sektor yang merasakan dampak pandemi *Covid-19* industri pariwisata. Akibat dari itu banyak wisatawan lokal maupun mancanegara membatalkan niat untuk mengunjungi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia per Juli 2020 mengalami penurunan sebesar 88,82% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada Juni 2019. Selain itu angka ini juga mengalami penurunan sebesar 2,06% dari bulan Juni 2020. Secara kumulatif (Januari–Juni 2020), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 3,09 juta kunjungan atau turun 59,96 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama

tahun 2019 yang berjumlah 7,72 juta kunjungan (BPS, 2020). Sementara itu Wisatawan Mancanegara yang datang ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan Desember 2021 berjumlah 163.619 kunjungan atau mengalami penurunan sejumlah -0,28% jika dibandingkan dengan bulan Desember 2020 yang berjumlah 164.079 kunjungan. (Kemenparekraf/Baparekraf, 2021).

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta "*pari*" yang berarti hal atau banyak melakukan dan kata "*wisata*" yang berarti perjalanan. Jadi pariwisata adalah perjalanan atau banyak melakukan perjalanan. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009, n.d.) yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara umum dan secara teknis mengenai pariwisata bahwa secara umum definisi pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan.

Sektor pariwisata di Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan devisa Negara. Jumlah devisa sektor pariwisata pada tahun 2018 mencapai angka 16,4 Miliar US, angka ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 13,1 Miliar US. Selain itu, proporsi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2017 mencapai 4,11% (BPS, 2019). Jika dilihat dari faktanya, pariwisata merupakan salah satu faktor pendorong perekonomian lokal suatu daerah, namun tak hanya itu sektor pariwisata juga

menjadi pendorong perekonomian Negara. Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi sudah tidak diragukan lagi (Roni Setiawan dan Broto Sunaryo, 2013). Oleh karena itu beberapa tahun terakhir banyak Negara yang menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam perolehan devisa. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki banyak keindahan pariwisata, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidangnya.

Kepulauan Riau salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam seni dan budaya, yang merupakan salah satu bidang penting dalam pariwisata. Pariwisata di Kepulauan Riau juga merupakan salah satu sektor utama dalam mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi. Salah satu Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara adalah Kawasan Wisata Lagoi yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Letak kawasan wisata Lagoi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Negara tetangga (Singapura dan Malaysia) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan objek wisata ini banyak diminati pengunjung. Kawasan wisata Lagoi atau biasa dikenal dengan Bintan Resort merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dengan pengusaha (Singapura). Kawasan ini sudah dibuka sejak 25 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1996 sebagai Kawasan Eksklusif Wisata Terpadu dibawah pengelolaan PT. Bintan Resort Cakrawala

(BRC). Dalam Perda Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, kawasan wisata Lagoi menjadi satu-satunya kawasan wisata yang sudah berkembang. (Solemede et al., 2020)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Keparawisataan dijelaskan bahwa pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional yaitu sebagai penghasil devisa dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa. Hal ini nampak dari keseriusan berbagai daerah dalam mengelola sektor pariwisata dengan tujuan supaya menjadi satu tujuan kunjungan wisata internasional dan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat begitu pula dengan daerah Kabupaten Bintan. Berikut data jumlah pengunjung wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau menurut bulan dan pintu masuk:

Tabel 1. 1 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau Menurut Bulan dan Pintu Masuk 2021

Periode	Batam	Bintan	Tanjungpinang	Karimun	Total Kepri 2021	Total kepri 2020	Total kepri 2019
Januari	156.752	10	12.361	10.585	525	220.696	192.856
February	95.256	33	3.806	7.357	346	124.465	233.194
Maret	43.564	5	2.079	3.581	858	54.102	260.289
April	1.133	5	-	6	676	1.139	229.250
Mei	1.798	-	-	-	530	1.798	225.171
Juni	1.785	-	-	2	542	1.787	265.904
Juli	1.754	-	-	-	322	1.765	217.313
Agustus	1.505	23	149	-	330	1.654	264.933
September	1.843	6	151	5	288	1.999	230.576
Oktober	457	34	154	-	316	740	227.146
November	459	12	-	1	-	561	241.249
Desember	471	54	-	-	-	542	276.914
TOTAL	306.777	182	18.700	21.537	4.733	411.248	2.864.795

Sumber: BPS PROV KEPRI, 2022

Data BPS menyebutkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara datang di Kepulauan Riau pada tahun 2019 sebanyak 2.864.795 pengunjung. Terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ini mengakibatkan penurunan sangat drastis yaitu berjumlah 411.248. Hal ini juga didukung dengan adanya peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang larangan sementara bagi orang asing untuk masuk maupun transit di Indonesia.

Covid-19 termasuk bencana non alam jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah Covid-19 akan terasa di seluruh sektor yang berkaitan dengan pariwisata, seperti perekonomian masyarakat lokal, mata pencaharian, dan lain-lain. Sebanyak 992 Tenaga Kerja di PHK dan 2.505 tenaga kerja dirumahkan. Selain itu estimasi penambahan penduduk miskin juga meningkat hal ini 1% sampai 2% selama pandemic Covid. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dan jutaan mata pencaharian di seluruh dunia terkena dampak Covid-19 (Sugihamretha, 2020). Data BPS menyebutkan bahwa jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Bintan pada tahun 2018 mencapai 503.542 jiwa (BPS, 2019). Sebelum adanya wabah Covid-19 pengunjung di Kepulauan Riau cukup menjadi daya Tarik bagi wisatawan dalam Negeri hingga Luar Negeri hal ini bertolak belakang akibat adanya Wabah Covid-19 yang mana telah memberikan dampak negatif bagi semua sektor usaha termasuk sektor

Industri Pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan. Berikut data kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Bintan:

Tabel 1. 2 Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Bintan

No	Bulan	Jumlah Wisatawan (Dalam Jiwa)			
		2018	2019	2020	2021
1	Januari	26.993	40.601	40.998	10
2	Februari	31.759	49.394	18.046	33
3	Maret	37.364	61.156	4.878	5
4	April	32.237	48.560	-	5
5	Mei	33.833	58.673	-	-
6	Juni	40.296	61.850	-	-
7	Juli	52.228	49.247	11	-
8	Agustus	57.995	55.638	-	23
9	September	34.075	50.232	-	6
10	Oktober	47.742	47.670	129	34
11	November	47.763	52.374	101	12
12	Desember	61.258	59.340	71	54
Jumlah		503.542	634.735	64.234	182

Sumber: BPS Kab.Bintan

Sementara itu wisatawan domestik yang datang di Kabupaten Bintan, sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Kunjungan Wisatawan Domestik Ke Kabupaten Bintan

No	Tahun	Jumlah Wisatawan (dalam jiwa)
1	2018	420.749
2	2019	348.761
3	2020	120.058
4	2021	169.551

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bintan, 2021

Dari data tersebut pada tahun 2018-2019 wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung di kabupaten bintan, tetapi pada tahun 2020-2021 wisatawan domestik lebih banyak dari pada wisatawan mancanegara ini juga dikarenakan pada tahun 2020 munculnya wabah Covid-19 dan menyebabkan wisatawan mancanegara terbatas untuk masuk ke Indonesia. Mengacu pada

rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, salah satu kebijakan pada sektor pariwisata yang di arahkan pada pengembangan pemasaran usaha. Namun munculnya wabah Pandemi Covid-19 meberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Khususnya Kabupaten Bintan yang mempunyai sektor Pariwisata yang menjadi penggerak ekonomi, seketika lumpuh akibat wabah Covid-19 ini. Namun, Pemerintah tetap mencari solusi terkait Wabah yang menyerang sektor Pariwisata ini.

Memaknai Upaya Progresif tersebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Barekraf) meluncurkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Kabupaten Bintan menerima sertifikat pertama Indonesia Care (*IdoCare*) ini merupakan salah satu bentuk kesiapan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau dalam melaksanakan Protokol Kesehatan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*). Program CHSE berfungsi sebagai panduan untuk kegiatan operasional sebuah daya tarik wisata yang tetap ingin buka tetapi dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar CHSE yang telah ditetapkan pemerintah. Pada Tanggal 26 September 2021 Kabupaten Bintan mendapatkan Sertifikat pertama Indonesia Care (*IDoCare*). Alasan Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Barekraf) memilih Kabupaten Bintan sebagai penerima sertifikat CHSE ini adalah karena Bintan

merupakan *One of the lowest hanging fruit* dan juga memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata kedepannya. Di keluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan. (Badan et al., 2020) Keselamatan dan Kelestraian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Hal tersebut masuk dalam salah satu Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*). Salah satu upaya untuk membangkitkan pariwisata, Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan kebijakan penerapan *Cleanliness, health, safety, and environment* (CHSE). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberi dukungan pembukaan pariwisata bagi wisatawan lokal dan nusantara, agar para wisatawan tersebut merasa aman dan nyaman dalam berwisata. Namun, Implementasi berjalannya program CHSE ini masih menunggu efeknya keseluruhan bagi pemulihan sektor pariwisata yang sampai saat ini masih belum teridentifikasi mendapatkan Sertifikasi CHSE.

Berdasarkan data bahwasanya di Kabupaten Bintan terdapat 85 usaha yang sudah terserifikasi CHSE sementara itu sektor usaha pariwisata di Kabupaten Bintan mencapai 900 sektor usaha pariwisata, diantara kategori usaha pariwisata yang sudah terserifikasi program CHSE adalah yaitu Daya Tarik Wisata (3 Usaha Terserifikasi), *Home Stay/Pondok Usaha* (21 Usaha Terifikasi), Hotel (31 Usaha Terserifikasi), Restoran Rumah Makan (23

Usaha Terserifikasi), Tempat Penjualan Cendramata (3 Usaha Terserifikasi), Usaha Golf (2 Usaha Terserifikasi), Usaha Jasa Transportasi Wisata (2 Usaha Terserifikasi). Bisa kita lihat kategori usaha pariwisata belum adanya terserifikasi Program CHSE pada bagian usaha-usaha pariwisata tingkatan menengah sampai ke bawah seperti wisma, Rumah makan yang di daerah Kawasan Pariwisata yang masih terbilang sederhana. Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Wan Rudy Iskandar Mengatakan untuk di Kepulauan Riau pada tahun 2020 yang akan mendapatkan sertifikasi CHSE ini sekitar 200 pelaku usaha. (*60 Pelaku Wisata Di Bintan Daftar Sertifikasi CHSE, 2020*). Menurut data CHSE, pelaku wisata di Bintan yang sudah registrasi sertifikasi CHSE sebanyak 60 restoran, hotel dan resort. Kesemuanya mendaftarkan diri secara online di laman <https://chse.kememparekraf.go.id/>. Sementara itu belum meratanya pelaku sektor usaha pariwisata yang belum terserifikasi sertifikat CHSE ini.

Perekonomian secara umum di Kabupaten Bintan mengakibatkan penurunan, itu disebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja akibat Pandemi Covid-19 tidak hanya itu karyawan yang bekerja di hotel-hotel, pelayan restoran yang bekerja di tempat pariwisata banyak pendapat pemutusan hubungan kerja dan bekerja dari rumah bahkan pelaku usaha di daerah-daerah wisata juga sepi dan tutup akibat sepi pengunjung.

Banyaknya potensi di sektor pariwisata yang dimiliki Kabupaten Bintan, di antaranya pariwisata Kabupaten Bintan sebagai penyumbang Rp. 107,5 Miliar (30 %seki PAD Pemkab Bintan) sekaligus meningkatkan

sumber Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2020 terjadi kondisi pandemi yang menyebabkan keuangan mengalami perubahan. Semua dana digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sangat berpengaruh dengan dana transfer di Kabupaten Bintan. PAD mengalami penurunan dikarenakan berbagai sumber pendapatan di Kabupaten yang mengandalkan sektor jasa pariwisata mengalami dampak yang luar biasa. Kondisi tahun 2021 belum dapat diprediksi mampu menempatkan PAD dan dana transfer seperti keadaan di tahun 2019, hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 belum berakhir. Berikut data pendapatan daerah Kabupaten Bintan :

Tabel 1. 4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan

Pendapatan Asli Daerah Kab Bintan		
No	Tahun	Jumlah PAD
1.	2018	286.602.276.549,94
2.	2019	372.155.030.107,70
3.	2020	178.150.350.087,45
4.	2021	28.130.000.000,00

Sumber: RPJMD Kab. Bintan, 2021

Pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata. Tentunya dengan adanya program CHSE ini dapat menjadi pedoman dan standar dalam sektor pariwisata. Dalam Penerapan Program CHSE ini masih banyaknya sektor-sektor Usaha Pariwisata yang belum mendapatkan sertifikasi CHSE. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul ***“Bagaimana Implementasi Program Cleanliness, Health, Safety, Environment Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan)”***

1. 2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana Implementasi Program *Cleanliness, Health, Safety, Environment* Dalam Mendukung Sektor Pariwisata pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan)?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana Implementasi Program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) Dalam Mendukung Sektor Pariwisata pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bintan dan untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program CHSE dalam mendukung sektor Pariwisata di Kabupaten Bintan.

1. 4 Manfaat Penelitian

1. 4. 1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengembangan ide-ide ilmiah, referensi bacaan dan menambah informasi bagi para pembaca mengenai gambaran Implementasi Program *Cleanliness, Health, Safety, Environment* Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan).

1. 4. 2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan terkait gambaran Implementasi Program Cleanliness, Health, Safety, Environment Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan). Serta diharapkan Penelitian dapat menyelesaikan masalah dan menjadi bahan masukan bagi pihak terkait, di antaranya:

a. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan

Penelitian ini bermanfaat memberikan masukan serta menambah wawasan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemulihan pariwisata akibat wabah Covid-19.

b. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan dan lebih memahami mengenai Implementasi Program CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Bintan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi gambaran umum mengenai Implementasi Program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety,*

Environment) Dalam Mendukung Sektor Pariwisata pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bintan serta dapat menjadi pengetahuan pembaca

